



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2021**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2021 dapat terelesaikan.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Laporan Kinerja Pemerintah diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang diemban menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*).

Mojokerto, Februari 2022

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SETDA KAB. MOJOKERTO

WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19731117 199303 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan	1
C. Dasar Hukum	1
D. Metode Penyusunan dan Sistematika Penyusunan LKjIP	2
E. Penjelasan Umum	3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
1. Tujuan	6
2. Sasaran	7
C. Program dan Kegiatan	7
D. Perjanjian Kinerja	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Evaluasi dan Analisa Kinerja	17
C. Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV : PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20
LAMPIRAN	
Lampiran I : Struktur Organisasi	
Lampiran II : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
Lampiran III : Perjanjian Kinerja	
Lampiran IV : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 merupakan wujud laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan rencana jangka menengah Tahun 2021 – 2026 yang memuat suatu pernyataan misi yang diemban serta yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, Sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 *terdapat 1 (satu) sasaran, 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 27.484.327.743* Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan maka capaian realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar 76,83 % dan capaian kinerja sebesar 110 % .

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Namun disadari pada Tahun 2021 ini capaian kinerjanya masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang tidak bisa dihindari baik dari internal maupun eksternal diantaranya pandemi covid 19. Untuk tahun mendatang Bagian Perencanaan dan Keuangan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja guna lebih mengoptimalkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2021 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk pertanggungjawaban Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pasal 21 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 10, pasal 17, pasal 20 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. Metode Penyusunan dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan berisi, penjabaran latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah. Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten.
2. Pada Bab II Perencanaan Kinerja, berisi penjelasan tentang muatan visi, misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 3.2 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 4 Pada Bab IV Penutup , berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Kabupaten Tahun 2021 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Rencana Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan

E. Penjelasan Umum

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
- Fungsi :
 - a. Perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan ;
 - b. Perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- c. Perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Adapun Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir pada ***lampiran 1*** .

2. Sumber Daya Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bagian Perencanaan dan Keuangan didukung oleh sumber daya organisasi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Aparatur :

Jumlah pegawai pada Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 15 orang terdiri dari:

- PNS : 13 orang
- Non PNS : 2 orang

Jumlah PNS berdasarkan jabatan / eselon :

- Eselon III : 1 orang
- Jabatan Fungsional : 3 orang
- Fungsional Umum : 9 orang

b. Sarana dan prasarana kerja :

Sarana dan prasarana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Lokasi Kantor:
 - Berada pada lokasi Kantor Bupati Mojokerto.
- Ruangan kerja terdiri dari :
 - Ruang kerja Kepala Bagian;
 - Ruang kerja Pejabat Fungsional dan fungsional umum;
 - Ruang rapat;
 - Gudang.
- Kendaraan terdiri dari :
 - Kendaraan dinas roda 4 (empat) Jumlah 1 (satu) unit ;
 - Kendaraan dinas roda 2 (dua) jumlah 3 (tiga) unit .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto bersama jajarannya mengampu visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perubahan Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tantangan bagi segenap aparatur di dalam Sekretariat Daerah untuk menunjukkan komitmen yang telah disepakati. Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Sebagai bentuk keseriusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan visi tersebut diatas maka perlu ditetapkannya misi yang merupakan gambaran aktifitas yang harus dilakukan. Dengan adanya misi akan terlihat jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana cara yang diambil untuk mencapainya.

Pernyataan misi yang jelas dan merupakan tonggak perencanaan strategik yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan mendukung keseluruhan misi organisasi. Pernyataan misi akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi, juga merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang dicapai. Dengan mengacu pada makna dan arti "MISI" maka rumusan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021 – 2026, Misi yang diemban oleh bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :

” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan, Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah”.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kab. Mojokerto. Sebagaimana misi yang diampu, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	1. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja pegawai

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Secara rinci Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir pada ***lampiran 2***.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kab. Mojokerto Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 , Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada ***lampiran 3***.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Secara Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat daerah Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2022. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai Visi dan Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Pencapaian Kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kab. Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kab. Mojokerto Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Program
	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95%	104%	109%
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpenuhi	85%	99%	116%

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas dapat digambarkan bandingan realisasi kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Th. 2019	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	95			104
	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi	85			99
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup setda.	100	100		
	Persentase laporan keuangan yang terselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu di lingkup Sekretariat Daerah.	100	100		
	Persentase pemenuhan fasilitasi sosialisasi	100	100		

	peraturan perundang – undangan yang terpenuhi				
Meningkatnya sistem pengelolaan administrasi dan sarana perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase dokumen surat – menyurat yang tersalurkan sesuai prosedur yang ditetapkan	100	100 -		
	Persentase pemenuhan sarana penunjang tugas pokok dan fungsi	90	99		
	Persentase pemenuhan chinderamata khas Kab. Mojokerto dalam kunjungan daerah	90	73		
	Persentase pemeliharaan sarana di lingkup Sekretariat Daerah Yang terpenuhi	85	112		
Meningkatnya pemenuhan sarana penunjang kedinasan	Persentase perlengkapan ASN yang terpenuhi	90	94		

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh informasi perbandingan indikator kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat daerah pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

		Target		
--	--	--------	--	--

Sasaran strategis	Indikator kinerja	akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	95	104	109
	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi	85	99	116

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap sasaran target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah dengan realisasi nasional

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi Th. 2021	Realisasi nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	104		
	Persentase pemenuhan	99		

	fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi			
--	---	--	--	--

Alokasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 terhadap 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dari semua total anggaran yang tersedia dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Persasaran

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran	% Anggaran dari total
	Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	42.310.000	0,15%
		Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi	27.442.017.743	99,85%

Berdasarkan prosentase anggaran dan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	95 %	104 %	109%	42.310.000	23.884.400	56,45 %
	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi	85 %	99 %	116%	27.442.017.743	21.093.385.954	76,87 %

Dari sasaran dan program di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan dapat di gambarkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya				

	pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah				
		Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	109	56,45	52,55
		Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah yang terpenuhi	116	76,87	39,13

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran tingkat capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Indikator kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten, yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator kinerja output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti bulan, unit, buku, persen dan lain – lain. Seperti juga pada indikator kinerja output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi

tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat satu kesamaan dalam merumuskan satu indikator output maupun outcome yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan fungsi.

Adapun pengukuran kinerja yang digunakan adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) secara rinci sebagaimana tercantum dalam **lampiran 4**.

B. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA

Secara umum Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, pada Tahun 2021 ini telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meskipun hasilnya belum maksimal. Dari 1 (satu) sasaran program dan 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja. Dalam Tahun 2021. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai sebesar 110%

Dari indikator kinerja diatas hasil yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi keuangan secara menyeluruh, sejak dari tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan serta adanya kepuasan dari pihak ketiga yang dilayani Bagian Perencanaan dan Keuangan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dalam hal ini dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kinerja pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan 1 (satu) sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Kegiatan	Pagu (RP.)	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan penatausahaan administrasi keuangan dan sarana penunjang tugas dan fungsi di lingkup Sekretariat Daerah	6 kegiatan / 14 sub kegiatan	27.484.327.743	21.117.270.354	76,83%

Secara umum capaian kinerja untuk 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu 76,83% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 110 %

Masih rendahnya capaian penyerapan anggaran tersebut tidak berarti rendah pula kinerja aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan. Seperti telah dijelaskan diatas rendahnya capaian anggaran karena adanya faktor eksternal yang belum bisa memenuhi target penyerapan, disamping adanya efisiensi penggunaan dana pada hampir setiap sasaran / kegiatan. Adapun kegiatan yang tingkat penyerapan anggaran rendah yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, hal ini dikarenakan standar satuan harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat, hal ini disebabkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan standar satuan harga (SSH) di SIPD lebih tinggi dari harga pasar dan anggaran untuk papan letter disesuaikan dengan pengajuan yang ada, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan adanya pandemi covid 19, realisasi sesuai pengajuan yang ada serta anggaran terkunci di SIPD terkait daerah kota tujuan, sedangkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan SSH di SIPD lebih tinggi dari harga pasar
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan SSH di SIPD lebih tinggi dari harga pasar/penyesuaian tarif listrik/telepon.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah “melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan “ sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Bagian Perencanaan dan Keuangan selalu berdasarkan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan pada Renstra maupun Renja.

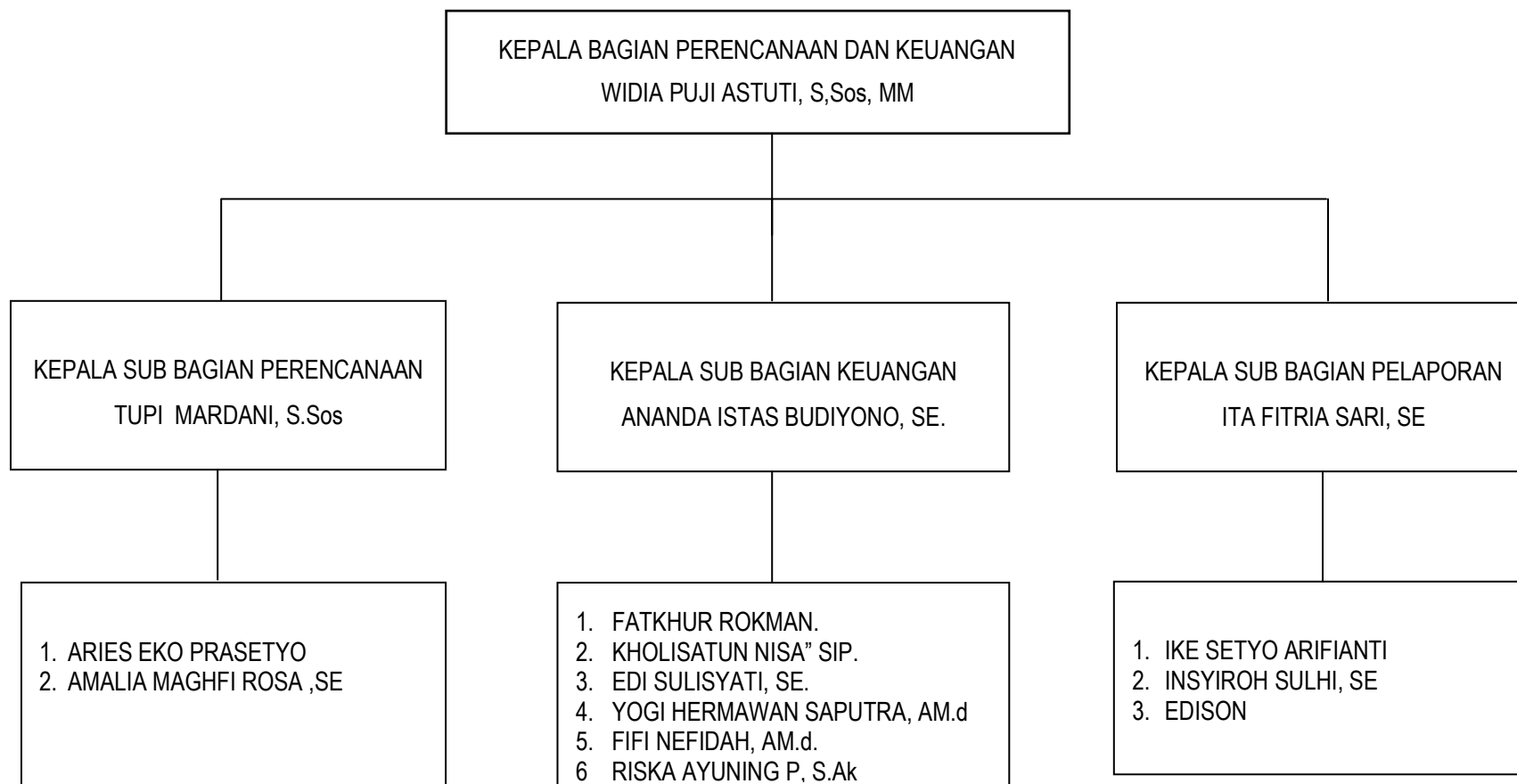
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, serta 6 (enam) kegiatan dan 14 sub kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, hal ini dikarenakan standar satuan harga di SIPD lebih tinggi dari harga pasar.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat, hal ini disebabkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan standar satuan harga (SSH) di SIPD lebih tinggi dari harga pasar dan anggaran untuk papan letter disesuaikan dengan pengajuan yang ada, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan adanya pandemi covid 19, realisasi sesuai pengajuan yang ada serta anggaran terkunci di SIPD terkait daerah kota tujuan, sedangkan pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan SSH di SIPD lebih tinggi dari harga pasar
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan SSH di SIPD lebih tinggi dari harga pasar/penyesuaian tarif listrik/telepon.

B. SARAN

1. Sebagai usaha meminimalisir kendala yang ada, Bagian Perencanaan dan Keuangan terus berupaya mengoptimalkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan unit kerja yang lain. Untuk itu diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk meningkatkan kinerja aparatur, sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata namun benar – benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka semua aparatur Bagian Perencanaan dan Keuangan di semua tingkatan harus proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan kewenangannya.
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian sebagai pengguna peralatan kantor untuk pro aktif dalam pelaksanaan pengajuan pemeliharaan peralatan gedung kantor sesuai SOP yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA KINERJA TAHUNAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Sarana penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah		27,484,327,743
		Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	42,310,000
		1 Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42,310,000
		1.1 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	22,165,000
		1.2 Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	20,145,000
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat	27,442,017,743
		2. Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan	23,913,032,943
		2.1 Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terpenuhi	23,877,277,943
		2.2 Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan	35,755,000
		3. Persentase sarana perlengkapan kedinasan	120,032,000
		3.1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta	120,032,000
		4 Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi	1,739,024,800
		4.1 Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta,	193,541,300
		4.2 Jumlah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata yang	493,683,500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
		4.3 Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang -	54,000,000
		4.4 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	997,800,000
		5 Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	460,891,000
		5.1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik.	273,120,000
		5.2 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa tenaga	187,771,000
		6 Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	1,209,037,000
		6.1 Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH	184,331,000
		6.2 Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari tertentu	214,526,000
		6.3 Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810,180,000

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARANBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA KAB. MOJOKERTO
2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Sarana penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah		90	100	111
		Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	95	104	109
		1 Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	95	104	109
		1.1 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	12	13	108
		1.2 Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12	12	100
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi	85	99	116
		2. Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	90	100	111
		2.1 Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terpenuhi	14	14	100
		2.2 Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan	16	16	100
		3. Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	90	99	110
		3.1 Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	205	203	99
		4 Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	85	100	118
		4.1 Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll.	1	1	100
		4.2 Jumlah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata yang disediakan :	6	6	100
		4.3 Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12	12	100
		4.4 Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12	12	100
		5 Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi	80	100	125

		5.1 Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik	12	12	100
		5.2 Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi	12	12	100
		6 Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	90	97	108
		6.1 Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi	14	14	100
		6.2 Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari tertentu KDH/WKDH yang terpenuhi	49	47	96
		6.3 Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	100	96	96



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos., M.M.
J a b a t a n : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.
J a b a t a n : SEKRETARIS DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Nopember 2021

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710427 199203 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOJOKERTO

WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah.	1.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	95%
		1.2 Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi di Lingkup Sekretariat Daerah Yang terpenuhi.	85%
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	27.484.327.743	P - APBD 2021
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.310.000	P - APBD 2021
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.913.032.943	P - APBD 2021
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.032.000	P - APBD 2021
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.739.024.800	P - APBD 2021
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.891.000	P - APBD 2021
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.209.037.000	P - APBD 2021
	JUMLAH	54.968.655.486	

Mojokerto, November 2021

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. TEGUH GUNARKO, MSi.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680327 198809 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOJOKERTO

WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos., M.M
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003



**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TUPI MARDANI, S.Sos., M.E.
J a b a t a n : KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

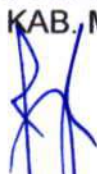
N a m a : WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M.
J a b a t a n : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117199303 2 003

Pihak Pertama,
KASUBAG. PERENCANAAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


TUPI MARDANI, S.Sos. M.E.
PEMBINA
NIP. 19680803 199003 1 010

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkup Setda.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 Dokumen/ Laporan
		Jumlah waktu pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat daerah	12 bulan
		Jumlah waktu penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah yang terpenuhi	12 bulan
		Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan yang terpenuhi	12 bulan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang terpenuhi	Jumlah waktu penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi	14 Bulan
		Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah dan sosialisasi peraturan perundang - undangan	91 Orang
		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12 bulan
3	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kedinasan	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	205 stel/potong
4	Terpenuhinya Sarana Perkantoran di Lingkup Sekretariat daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik.	12 bulan
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi	Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi	14 Bulan
		Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari tertentu KDH/WKDH yang terpenuhi	49 Stel / Potong
		Persentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.165.000	P - APBD 2021
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.913.032.943	P - APBD 2021
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.755.000	P - APBD 2021
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000	P - APBD 2021
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	P - APBD 2021
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.120.000	P - APBD 2021
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	184.331.000	P - APBD 2021

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
8	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.526.000	P - APBD 2021
9	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.180.000	P - APBD 2021
	Jumlah	25.627.109.943	

Mojokerto, November 2021

Pihak kedua,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT KAB. MOJOKERTO


WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Pihak Pertama,
KASUBAG. PERENCANAAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


TUPI MARDANI, S.Sos., M.E.
PEMBINA
NIP. 19680803 199003 1 010



**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANANDA ISTAS BUDIYANTO, SE.

J a b a t a n : KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M

J a b a t a n : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2021

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**


WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Pihak Pertama,

**KASUBAG. KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOJOKERTO**



ANANDA ISTAS BUDIYANTO, SE.
PENATA
NIP. 19730418 201001 1 006

Lampiran :


PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Terpenuhi	1.1 Pengendalian dan Fasilitasi Anggaran Rutin/Operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah , Serta Sekretariat Daerah.	10 Unit kerja
		1.2 Pengevaluasian Verifikasi dan Pendokumentasian Penatausahaan Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah.	10 Unit kerja
		1.3 Penyusunan Laporan Persediaan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Serta Laporan Mutasi Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah.	10 Unit kerja
		1.4 Rekonsiliasi Aset, Anggaran Kas dan Anggaran Belanja Sesuai Dengan Realisasi Anggaran Guna Penyusunan Bahan Laporan Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah.	10 Unit kerja
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	-	-	-
	Jumlah	0	

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos.,M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Mojokerto, November 2021
Pihak Pertama,
KASUBAG. KEUANGAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOJOKERTO


ANANDA ISTAS BUDIYANTO, S.E.
PENATA
NIP. 19730418 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ITA FITRIA SARI, SE.

J a b a t a n : KEPALA SUB. BAGIAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M.

J a b a t a n : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SETDA. KAB MOJOKERTO


WIDIA PUJI ASTUTI., S.Sos., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Pihak Pertama,

KASUBAG. PELAPORAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SETDA. KAB.MOJOKERTO


ITA FITRIA SARI, SE.
PENATA
NIP. 19820728 201001 2 009


Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkup Setda.	Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Dokumen/ Laporan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang terpenuhi	Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta, ballpoint dll.	1 paket
		Jumlah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata yang disediakan :	6 paket
		Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam Daerah	12 bulan
3	Terpenuhinya Sarana Perkantoran di Lingkup Sekretariat daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan. dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi	12 bulan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.145.000	P - APBD 2021
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.541.300	P - APBD 2021
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	493.683.500	P - APBD 2021
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	997.800.000	P - APBD 2021
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.771.000	P - APBD 2021
	Jumlah	1.892.940.800	

Pihak kedua,
KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos.,M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731117 199303 2 003

Mojokerto, November 2021
Pihak Pertama,
KASUBAG. PELAPORAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA. KAB. MOJOKERTO


ITA FITRIA SARI, SE.
PENATA
NIP. 19820728 201001 2 009